

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di semua negara sedang berkembang. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia sehingga produktifitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah.

Masalah kemiskinan merupakan salah satu faktor utama dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan serta pertumbuhan ekonomi di semua sektor pembangunan, pemerataan pembangunan yang optimal, perluasan tenaga kerja dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Dalam mencapai tujuan pembangunan secara menyeluruh diperlukan adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata.

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan nasional adalah salah satu upaya untuk menjadi tujuan masyarakat adil dan makmur. Sejalan dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan telah diarahkan kepada pembangunan daerah khususnya daerah yang relatif mempunyai tingkat kemiskinan yang terus naik dari tahun ke tahun. Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Oleh karena

itu, salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah menurunnya jumlah penduduk miskin. Efektifitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin dalam memilih strategi pembangunan, hal ini berarti salah satu kriteria utama pemilihan sektor titik berat atau sector andalan pembangunan nasional adalah efektifitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin (Wijayanto, 2010).

Tujuan dasar dan paling essensial dari pembangunan adalah mengangkat derajat kehidupan manusia yang berada pada lapisan paling bawah (penduduk miskin) kepada tingkatan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Kemiskinan akan membatasi seseorang atau sekelompok orang untuk memenuhi hak-hak dasarnya seperti tidak terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Semakin besar jumlah dan persentase penduduk miskin pada satu daerah, beban pembangunan pada daerah tersebut akan semakin besar pula, peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan sangat besar untuk menanggulangi kemiskinan melalui berbagai program. Namun program-program yang dicanangkan oleh pemerintah belum mencapai hasil yang maksimal dan belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Persentase penduduk miskin menunjukkan penurunan bertahap dan kadang mengalami fluktuasi.

Kompleksnya masalah kemiskinan dipengaruhi oleh banyak faktor yang menyebabkan munculnya kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi, artinya kemiskinan erat kaitannya dengan segala aspek kehidupan masyarakat sehingga upaya untuk memecahkan masalah kemiskinan tidaklah mudah.

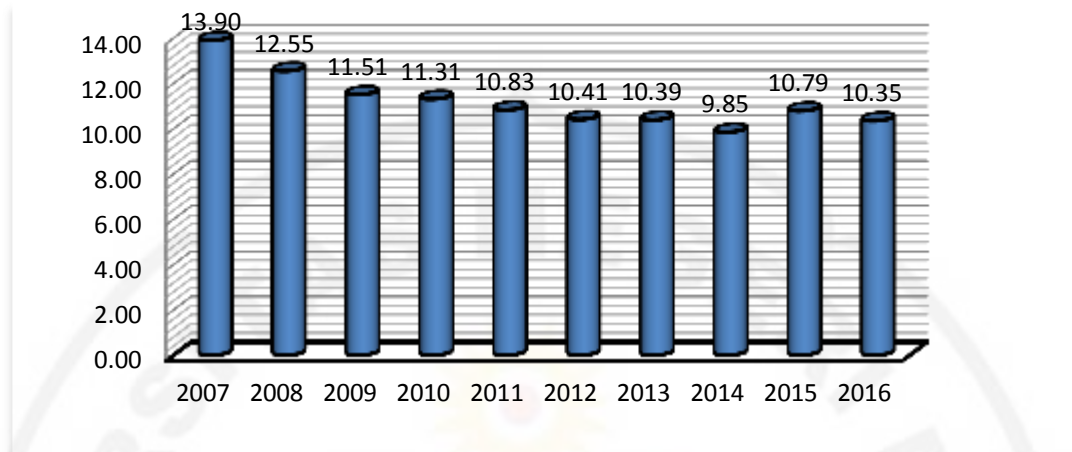
Berdasarkan data BPS pada september 2015 sebanyak 54,81 persen kepala rumah tangga miskin berpendidikan SD kebawah. Hal ini membuat penduduk miskin memiliki keterbatasan untuk mengembangkan diri. Akibatnya mereka tidak mampu bersaing di arena lapangan kerja yang semakin terbatas dan menuntut kualifikasi yang tinggi. Keadaan tersebut memaksa mereka untuk menganggur atau bekerja dengan upah yang rendah sehingga penghasilan yang mereka terima tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Penghasilan yang sangat minim ini pada akhirnya membawa dampak negatif seperti buruknya derajat kesehatan dan gizi yang akan mempengaruhi daya tahan fisik dan daya pikir sehingga mengurangi prakarsa dan inisiatif. Keadaan sedemikian rupa mempersulit mereka untuk dapat mengubah nasibnya menjadi lebih baik tanpa adanya bantuan dari pihak lain.

Tingkat kemiskinan yang masih tinggi memberikan indikasi bahwa ada sesuatu yang perlu dicermati dan dikaji ulang atas strategi, dan program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah. Jika dilihat dari sisi anggaran yang dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan meningkat tajam dari Rp. 18 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp. 54 triliun di tahun 2007, dan dinaikkan lagi menjadi Rp. 62 triliun pada tahun 2008. Langkah-langkah konsolidasi program penanggulangan kemiskinan ini diluncurkan pemerintah dalam tiga cluster yaitu Paket Bantuan Program I yang merupakan bantuan dan perlindungan sosial (bantuan langsung tunai, beras miskin/ raskin, jaminan kesehatan masyarakat/ jamkesmas, Program Keluarga Harapan/ PKH, Bantuan operasional Sekolah/BOS, bantuan sosial untuk pengungsi/ korban bencana, bantuan untuk penyandang cacat, bantuan untuk kelompok lansia, dan lain-lain),

Paket Bantuan II yang merupakan program pemberdayaan masyarakat (PNPM Mandiri), dan paket Bantuan Program III yang merupakan program pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK-KUR). Jumlah dan persentase penduduk miskin turun selama tahun 2007-2009, namun banyak pihak menilai penurunan tersebut belum signifikan terutama jika dibandingkan dengan jumlah anggaran yang dibelanjakan.

Penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh, yang berarti menyangkut seluruh penyebab kemiskinan. Beberapa diantaranya yang menjadi bagian dari penanggulangan kemiskinan tersebut yang perlu tetap ditindak lanjuti dan disempurnakan implementasinya adalah perluasan akses kredit pada masyarakat miskin, peningkatan pendidikan masyarakat, perluasan lapangan kerja dan pembudayaan entrepreneurship (Hureirah, 2005).

Sebenarnya upaya penanggulangan kemiskinan sudah dilakukan sejak tiga dekade terakhir yaitu dengan penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir melalui sistem kredit, pembangunan prasarana dan pendampingan, penyuluhan sanitasi dan sebagainya. Dari serangkaian cara dan strategi penanggulangan kemiskinan tersebut, semuanya berorientasi material, sehingga keberlanjutannya sangat tergantung pada ketersediaan anggaran dan komitmen pemerintah. Disamping itu, tidak adanya tatanan pemerintahan yang demokratis menyebabkan rendahnya akseptabilitas dan inisiatif masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara mereka sendiri (Hureirah, 2005).



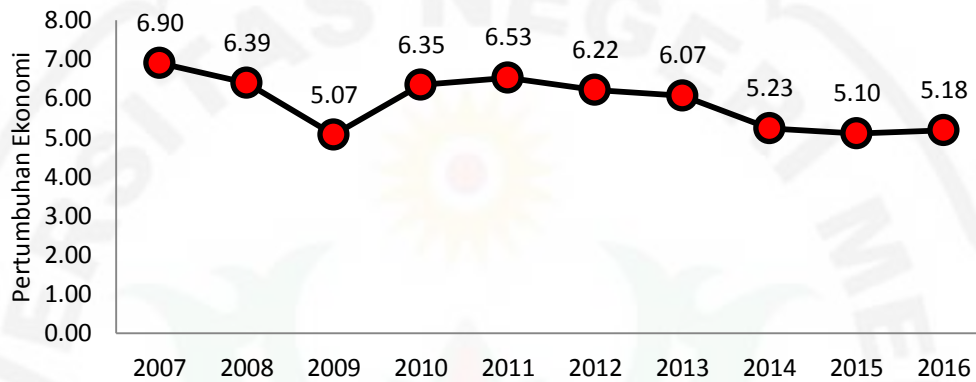
Gambar 1.1. Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara Periode 2007-2016

Dari Gambar 1.1. tampak bahwa selama kurun waktu tahun 2007 sampai tahun 2016 persentase penduduk miskin di Sumatera Utara mengalami fluktuasi. Persentase penduduk miskin Sumatera Utara terus mengalami penurunan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2014, namun pada tahun 2015 mengalami peningkatan dari 9,85 persen naik menjadi 10,79 persen. Namun pada tahun 2016 persentase penduduk miskin di Sumatera Utara kembali mengalami penurunan.

Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara mencapai angka 1.455.900 jiwa atau sekitar 10,35 persen masih terlalu tinggi. Meski cenderung mengalami penurunan, namun kondisi tersebut belum masuk dalam zona aman. Untuk itu, dirasa perlu untuk mencari solusi yang tepat untuk penanggulangan masalah kemiskinan tersebut.

Sementara itu jika dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2000 dan 2010, dari tahun 2007 sampai tahun 2016, juga mengalami fluktuasi. Terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami naik turun diiringi dengan jumlah penduduk miskin yang juga mengalami naik

turun, artinya bahwa secara tidak langsung tingkat ekonomi akan berdampak pada jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara kurun waktu tahun 2007-2016 dalam gambar 1.2 sebagai berikut:

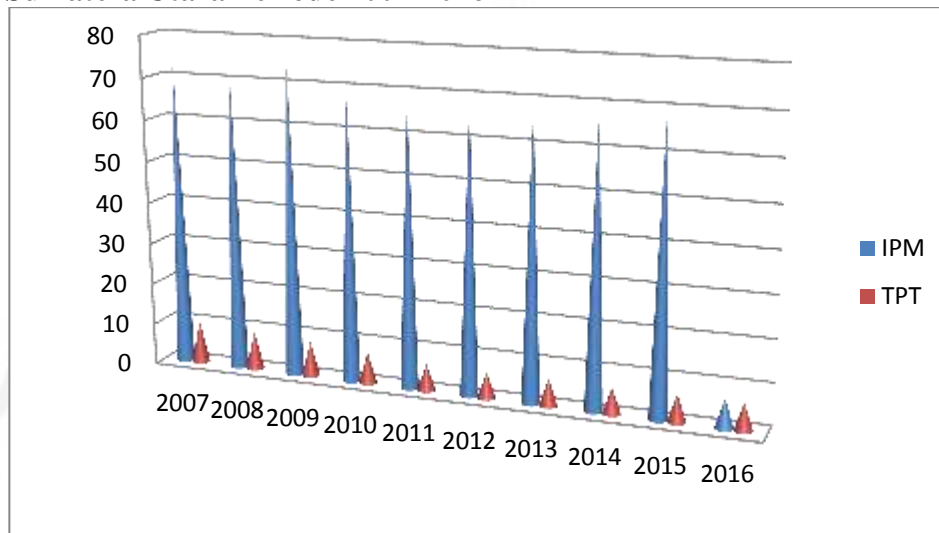


Gambar 1.2. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Tahun 2007 – 2016

Sementara itu IPM sebagai salah satu ukuran dan patokan dasar dalam penentuan sasaran dan tujuan pembangunan daerah dapat dijadikan dasar penentuan keberhasilan penanggulangan kemiskinan disamping untuk mengukur keberhasilan pembangunan lainnya seperti tingkat pendidikan, kesehatan dan paritas pendapatan masyarakat.

Tahun 2007 IPM provinsi Sumatera Utara sebesar 72,78, sedangkan tahun 2008 sampai tahun 2009 berturut-turut IPM provinsi Sumatera Utara sebesar 73,29, 73,80, 67,09, 67,09 dan 67,34. Perkembangan IPM dan tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel 1.1. berikut ini.

Tabel 1.1. Indeks Pembangunan Manusia Dan Tingkat Pengangguran Sumatera Utara Periode 2007-2016



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016 (diolah)

Jika dilihat perkembangan tingkat IPM di Sumatera Utara selama kurun waktu 2007–2016 yang secara perlahan meningkat. Data 2010 seyogyanya bukan menunjukkan penurunan, melainkan metode yang digunakan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Metode baru tersebut digunakan dalam rangka penyesuaian dengan data global. Disamping masalah pertumbuhan ekonomi dan IPM yang diduga kuat memiliki korelasi dengan jumlah penduduk miskin, adalah tingkat pengangguran atau sering disebut tingkat pengangguran terbuka (TPT) menyebabkan ketidakmampuan penduduk miskin mengkonsumsi barang-barang kebutuhan pokok tersebut.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di provinsi Sumatera Utara tahun 2007 sampai dengan 2016 mengalami fluktuasi. Secara umum dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 pengangguran terbuka di Sumatera Utara mengalami penurunan. Tahun 2007 TPT Sumatera Utara sebesar 10,10 persen dan di tahun 2012 sebesar 6,20 persen. Penurunan ini sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam hal ketenagakerjaan. Namun, pada tahun-tahun selanjutnya

terjadi naik turun. Hal tersebut menunjukkan bahwa fondasi dalam menekan jumlah pengangguran terbuka di Sumatera Utara masih tergolong tidak stabil. Hasil tersebut tidak sebanding dengan alokasi anggaran yang dikururkan oleh pemerintah dalam upaya menekan jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara.

Dari uraian dan penjelasan diatas dan atas dasar pemikiran tersebut, penulis terdorong untuk mendalami dan meneliti masalah” **Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Utara**

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian-uraian tersebut, penulis merumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara?
2. Apakah ada pengaruh IPM terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara?
3. Seberapa besar pengaruh tingkat pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara
2. Untuk menganalisis pengaruh IPM terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara

3. Untuk menganalisis tingkat pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengurangi jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis dalam disiplin ilmu yang penulis tekuni.
3. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi masyarakat yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara.